

Peran Bahasa Indonesia dalam penyusunan Dokumen Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum

Meilina Widya Dali^a, Rifangga Manangin^b, Andriyani Halim^c, Nur Asivah Mooduto^d, Wulandari Kobandaha^e, Raisatun Nisa Tifany Naue^f, Nadifa H Pilomonu^g, Stevie Ramadhani K Hasan^h, Nur Arafah H Raufⁱ, Abdulrauf Yusuf^j, Muhammad Rifky Rumpabulu^k, Febrian Yatu^l, Haikal Akutali^m

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
email: meilinauldali@ung.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 28 November 2025

Revised : 21 Desember 2025

Accepted : 29 Desember 2025

Keywords:

Indonesian language, legal language, legal aid documents, Legal Aid Institute, legal certainty

Kata Kunci:

Bahasa Indonesia, bahasa hukum, dokumen bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum, kepastian hukum

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Indonesian language in the preparation of legal documents at the Legal Aid Institute of the Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, and its implications for clients' understanding and interpretation as lay members of society. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth semi-structured interviews with the Head of the Legal Aid Institute and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that the use of standard, accurate, and legally appropriate Indonesian significantly affects the clarity and effectiveness of legal aid documents. However, differences in the meaning of legal terms between the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), statutory regulations, and public understanding often create potential ambiguity in document interpretation. Therefore, the Legal Aid Institute plays a crucial role in verifying, simplifying, and explaining legal language to ensure clients' comprehension without diminishing its normative substance. This study confirms that the quality of Indonesian language use in legal aid documents is a key factor in ensuring legal certainty and enhancing access to justice for the community.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bahasa Indonesia dalam penyusunan dokumen hukum di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo serta implikasinya terhadap pemahaman dan interpretasi klien sebagai masyarakat awam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara semiterstruktur dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang baku, tepat, dan sesuai dengan karakteristik bahasa hukum berpengaruh signifikan terhadap kejelasan dan keefektifan dokumen bantuan hukum. Namun, perbedaan makna istilah antara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan, dan pemahaman masyarakat sering menimbulkan potensi ambiguitas dalam interpretasi dokumen hukum. Oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum berperan penting dalam memverifikasi, menyederhanakan, dan menjelaskan bahasa hukum agar dapat dipahami oleh klien tanpa menghilangkan substansi normatifnya. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen bantuan hukum merupakan faktor kunci dalam menjamin kepastian hukum dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

LATAR BELAKANG

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional.(Al-Azizi et al., 2025) Dalam konteks praktik hukum, Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi formal, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menentukan kejelasan, kepastian, dan keberlakuan hukum. Seluruh produk hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya, disusun dan diberlakukan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum nasional.(Marlia et al., 2023, pp. 2–3) Dalam praktik bantuan hukum, peran Bahasa Indonesia menjadi semakin penting karena dokumen hukum yang disusun tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat pencari keadilan yang memiliki latar belakang sosial, pendidikan, dan kebahasaan yang beragam.(Riana & Junaidi, 2017) Dokumen bantuan hukum, seperti surat kuasa, gugatan, permohonan, dan surat pendampingan hukum, berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan norma hukum yang bersifat abstrak ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kualitas penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen bantuan hukum secara langsung memengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).(Azalia, 2020)

Namun demikian, penggunaan bahasa hukum yang cenderung teknis, kaku, dan sarat istilah khusus sering kali menimbulkan kesenjangan pemahaman antara praktisi hukum dan klien. Bahasa hukum yang tidak disesuaikan dengan kemampuan pemahaman masyarakat berpotensi menciptakan ambiguitas makna dan perbedaan interpretasi terhadap isi dokumen hukum. Kondisi ini dapat merugikan klien, terutama kelompok masyarakat rentan yang menjadi sasaran utama layanan bantuan hukum, karena mereka tidak sepenuhnya memahami hak, kewajiban, serta implikasi hukum dari dokumen yang mereka tandatangani atau jalani.(Putra et al., 2023, p. 4)

Selain itu, perbedaan makna istilah antara Bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian normatif dalam peraturan perundang-undangan, dan pemahaman masyarakat awam turut memperumit penggunaan bahasa dalam dokumen bantuan hukum. Istilah hukum tertentu dapat memiliki makna teknis yang berbeda dari makna sehari-hari,

sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran apabila tidak dijelaskan secara tepat dan kontekstual. Dalam hal ini, bahasa tidak lagi sekadar persoalan linguistik, tetapi juga berkaitan langsung dengan jaminan kepastian hukum dan akses terhadap keadilan. (Kurdi & Yamin, 2025)

Kajian mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam konteks hukum telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Fuady (2024) dalam artikel berjudul *Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya* yang dipublikasikan dalam *Innovative: Journal of Social Science Research*. Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa baku dalam dokumen hukum serta dampaknya terhadap validitas dan konsekuensi yuridis suatu dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak konsisten berpotensi menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan para pihak dalam proses hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa bahasa baku memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum.

Penelitian lain dilakukan oleh Putri Sarah dan Hindun (2022) dalam artikel *Pemakaian Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Penyelesaian Kasus Persidangan Perdata* yang diterbitkan dalam *Jurnal Pembahsi Universitas PGRI Palembang*. Penelitian ini berfokus pada penggunaan Bahasa Indonesia dalam proses persidangan perdata dan pengaruhnya terhadap pemahaman para pihak yang terlibat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak tepat dapat menghambat proses komunikasi hukum di persidangan, terutama bagi pihak non-ahli hukum. Meskipun konteks penelitian ini berada pada ranah persidangan, temuan tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa ketepatan penggunaan bahasa merupakan faktor penting dalam menjamin efektivitas proses hukum secara formal.

Selanjutnya, penelitian oleh Ana (2020) berjudul *The Characteristics of Indonesian Legal Language in Notarial Documents* yang dipublikasikan dalam *International Linguistics Research* mengkaji karakteristik Bahasa Indonesia dalam dokumen notariil. Penelitian ini mengungkap bahwa bahasa hukum Indonesia dalam dokumen notaris memiliki ciri khas tertentu, seperti struktur kalimat yang kompleks, penggunaan istilah teknis, serta kecenderungan formalitas yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa dokumen hukum memerlukan pemahaman linguistik khusus agar tidak menimbulkan ambiguitas makna. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam kajian tekstual bahasa hukum Indonesia, khususnya pada dokumen legal formal.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang baku, tepat, dan sesuai dengan karakteristik bahasa hukum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas proses hukum. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada dokumen hukum formal seperti dokumen notariil dan proses persidangan. Penelitian yang secara khusus menelaah penggunaan Bahasa Indonesia dalam penyusunan dokumen bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman klien sebagai masyarakat awam, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara empiris peran Bahasa Indonesia dalam penyusunan dokumen bantuan hukum serta implikasinya terhadap interpretasi dan pemahaman klien di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah dan memahami makna yang muncul dari permasalahan sosial atau kemanusiaan melalui proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Dalam penelitian ini, data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terlibat secara langsung dalam penyusunan dan pendampingan dokumen bantuan hukum. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai kualitas penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen hukum, kendala yang dihadapi dalam pemilihan istilah hukum, serta upaya yang dilakukan oleh LBH dalam menyederhanakan bahasa hukum agar lebih mudah dipahami oleh klien. Hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan peran bahasa dalam kejelasan dan keefektifan dokumen, kualitas bahasa Indonesia dalam dokumen, pengaruh bahasa terhadap interpretasi dokumen dan tantangan penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hasil wawancara tersebut dirangkum dan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan peran bahasa Indonesia dalam penyusunan dokumen hukum di Lembaga Bantuan Hukum. Adapun transkrip wawancara disertakan dalam lampiran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. wawancara semi-terstruktur memanfaatkan paduan topik sebagai acuan, namun tetap memungkinkan fleksibilitas dalam penyampaian pertanyaan. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. (Sugiono, 2013) Hasil analisis data dari wawancara kemudian disusun ke dalam beberapa subtopik berikut:

a. Peran Bahasa Indonesia dalam menentukan kejelasan dan keefektifan dokumen hukum

Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kejelasan dan keefektifan dokumen hukum. Dalam penulisan dokumen hukum, bahasa Indonesia yang digunakan harus bersifat baku dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, guna menjaga keotentikan norma serta mencegah terjadinya perbedaan interpretasi terhadap maksud yang hendak disampaikan.

Meskipun terdapat sejumlah istilah hukum yang tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hal tersebut tidak serta-merta mengurangi kejelasan dan keefektifan dokumen hukum, sepanjang istilah-istilah tersebut telah dipahami secara konsisten oleh praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam praktiknya.

b. Kualitas Bahasa Indonesia dalam dokumen hukum

Kualitas Bahasa Indonesia dalam penyusunan dokumen hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan aspek penting karena dokumen tersebut menjadi dasar dalam memberikan

pendampingan dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam dokumen bantuan hukum tidak hanya harus sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia baku, tetapi juga harus mengikuti karakteristik bahasa hukum yang memiliki istilah dan makna khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik di LBH, sering ditemukan perbedaan antara makna istilah dalam KBBI dan makna istilah hukum dalam undang-undang, sehingga ketepatan penggunaan bahasa menjadi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran.

Permasalahan kualitas bahasa juga berkaitan dengan pemahaman klien terhadap dokumen hukum. Banyak klien LBH tidak memahami isi dokumen yang mereka miliki karena penggunaan bahasa hukum yang kaku dan istilah yang tidak dijelaskan secara memadai. Masyarakat pada umumnya juga tidak mengetahui apakah bahasa yang digunakan dalam dokumen hukum sudah baku atau sesuai dengan kaidah bahasa hukum. Oleh karena itu, klien sangat bergantung pada peran LBH dalam menjelaskan dan memperbaiki bahasa dalam dokumen hukum tersebut.

Dalam hal ini, LBH berperan penting dalam memverifikasi, menyederhanakan, dan menyusun dokumen bantuan hukum dengan Bahasa Indonesia yang jelas, tepat, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jika diperlukan, LBH dapat melibatkan ahli bahasa untuk memastikan ketepatan istilah dan struktur kalimat. Dengan menjaga kualitas Bahasa Indonesia dalam penyusunan dokumen hukum, LBH tidak hanya membantu klien memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat.

c. Pengaruh Bahasa Indonesia terhadap interpretasi dokumen hukum

Kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan dokumen hukum adalah perbedaan interpretasi dalam KBBI dan Interpretasi dalam undang-undang yang kadang cenderung berbeda. Contoh: Ketika misalnya ada istilah yang dimaknai oleh KBBI dan di maknai juga oleh Undang-undang tetapi istilah-istilah tersebut tidak di pahami secara seragam oleh masyarakat, disitulah letak kesulitan dalam penulisan dokumen hukum. Pihak LBH dalam hal ini akan mencari tau terlebih dahulu apakah istilah yang digunakan sudah tepat untuk menyatakan maksud tertentu. Contoh : istilah "Kecelakaan" beberapa masyarakat menyimpulkan bahwa "kecelakaan" adalah insiden tabrakan, tetapi sebagian masyarakat juga menyimpulkan istilah "kecelakaan" bisa di artikan untuk kecelakaan yang menyebabkan kehamilan. Istilah "Kecelakaan" di KBBI bisa jadi berbeda artinya menurut sebagian masyarakat sehingga menggunakan "Kecelakaan" di dokumen hukum itu harus dijabarkan lagi lebih detail apa yang di maksud dengan kecelakaan.

d. Tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia di LBH

Penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan dokumen hukum sudah sangat baik. Namun, tetap saja ada beberapa tantangan lain yang muncul, seperti: ada beberapa klien yang datang masih dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing sehingga pihak LBH harus memanggil penerjemah agar bisa dengan mudah dimengerti dan tidak melakukan kesalahan pada saat menyusun dokumen. Kemudian, ada beberapa klien yang memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas sehingga membuat proses komunikasi menjadi lebih lama. Namun hal demikian, masih bisa dengan sangat baik di atasi oleh pihak LBH.

PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam penyusunan dokumen bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi formal, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menentukan kejelasan, kepastian, serta efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Penggunaan bahasa yang baku, tepat, dan sesuai dengan karakteristik bahasa hukum terbukti berpengaruh langsung terhadap pemahaman klien terhadap isi dokumen hukum yang mereka terima.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perbedaan makna istilah antara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan, dan pemahaman masyarakat awam menjadi salah satu sumber utama terjadinya potensi ambiguitas dalam dokumen hukum. Oleh karena itu, peran LBH menjadi sangat penting dalam memverifikasi, menjelaskan, dan menyederhanakan bahasa hukum agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi, khususnya bagi klien dengan latar belakang pendidikan dan kebahasaan yang beragam. Upaya penyederhanaan bahasa hukum tanpa menghilangkan substansi normatif merupakan bentuk konkret dari pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kualitas penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen hukum di LBH secara umum sudah baik, masih terdapat tantangan dalam praktik, seperti perbedaan bahasa daerah dan keterbatasan pemahaman klien. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui komunikasi intensif, pendampingan yang berkelanjutan, serta keterbukaan LBH dalam menyesuaikan bahasa hukum dengan kemampuan pemahaman klien. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas bahasa dalam dokumen bantuan hukum merupakan faktor penting dalam menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azizi, A. V., Ceiin, N., Alwina, L., Nurjanah, P. J., Yuniati, I., & Safitri, W. (2025). Hakikat, Sejarah Perkembangan, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. *Journal of Literature Review*, 1(2), 547–553. <https://doi.org/10.63822/zec6pn55>
- Azalia, S. N. (2020). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legislation*, 1(2), 79–104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>
- Kurdi, & Yamin. (2025). Evaluasi Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Hukum: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Yang Terlibat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 963–973. <https://doi.org/10.31933/zjaz4g90>

- Marlia, Lukmana, I., & Gunawan, W. (2023). Contesting Indonesian Plain vs Legal Languages: Analysis of Effectiveness on Indonesian Controversial Law. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(5), 1217–1225. <https://doi.org/10.17507/tpls.1305.16>
- Putra, I. P. R. A., Artha, I. G., Adiyaryani, N. N., Sugama, I. D. G. D., & Puspasari, N. K. R. (2023). SOSIALISASI PERAN PENTING LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEBAGAI ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI DESA CAU BELAYU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN. *Buletin Udayana Mengabdi*, 22(2), 82. <https://doi.org/10.24843/BUM.2023.v22.i02.p05>
- Riana, R., & Junaidi, M. (2017). *PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA BAKU UNTUK MENDUKUNG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM*.
- sugiono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. alfabeta.
- Chaer, A. (2011). *Tata bahasa praktis bahasa Indonesia*. Rineka Cipta.
- Fuady, A. R., Rabbani, B. R., Reina, Z., Novia, M., & Nurhayati, E. (2024). Pentingnya bahasa baku dalam dokumen hukum: Aspek legal dan konsekuensinya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 1715–1729.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Sekretariat Negara.
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. UNS Press.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktik*. Sinar Grafika
- Wignarso, T. (2015). Bahasa hukum sebagai sarana kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 365–382.